

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 079/HK.04.00/K.YO/03/2023**

**TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA KOMPETISI KAJIAN HUKUM DIBIDANG
KEPEMILUAN BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Ayat 3 huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu diselenggarakan penyusunan analisis dan kajian hukum yang baik dan berkualitas oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu D.I. Yogyakarta;
 - b. bahwa sebagai bentuk inovasi penyusunan kajian hukum, Bawaslu D.I. Yogyakarta perlu mengadakan peningkatan kualitas penyusunan kajian hukum dengan turut melibatkan Pengawas Pemilu Kecamatan;
 - c. bahwa program penyusunan kajian hukum Bawaslu D.I. Yogyakarta perlu mendapatkan output berupa buku kajian hukum yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Kompetisi Kajian Hukum Dibidang Kepemiluan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2023 Revisi ke-2 tanggal 14 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KOMPETISI KAJIAN HUKUM DIBIDANG KEPEMILUAN BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023; |
| Kesatu | : Membentuk Panitia Penyelenggara Kompetisi Kajian Hukum Dibidang Kepemiluan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini; |
| Kedua | : Panitia Penyelenggara Kompetisi Kajian Hukum Dibidang Kepemiluan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan para |

peserta kompetisi kajian hukum, pengumpulan karya kajian hukum yang telah dikirimkan oleh peserta, melakukan penilaian karya kajian hukum, penyerahan penghargaan pada penulis kajian hukum terbaik, dan melakukan penyusunan buku kajian hukum;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Kompetisi Kajian Hukum Dibidang Kepemiluan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Keempat : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara Kompetisi Kajian Hukum Dibidang Kepemiluan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Maret 2023


Ketua
Sutrisnowati, S.H.,M.H.,M.Psi

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
 2. Untuk Yang bersangkutan;
 3. Peringgal
-

**Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**
Nomor : 079/HK.04.00/K.YO/03/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN KOMPETISI KAJIAN HUKUM DIBIDANG
KEPEMILUAN BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Anggota :
1. Intan Fransiska Riyan Sahara
2. Rayu Anitawati
3. Fahri Hanindita Satriyo
4. Muhammad Zulfikar Arsyad
5. Mugi Hartana
6. Yunita Melinda Putri